

# COBA DAN SALAH DALAM POLITIK

Oleh Nurcholish Madjid

Dalam salah satu kesempatan diskusi dengan kalangan terbatas sambil makan siang di Orientale Room HI, J.P. Pronk selaku Ketua IGGI mengemukakan suatu pertanyaan — setelah ia sendiri menerima dan menjawab banyak sekali pertanyaan — apakah pola pembangunan yang telah berjalan hampir lima tahun sekarang ini manfaatnya bagi rakyat benar-benar nyata dan apakah pola itu akan diteruskan untuk lima tahun lagi yang akan datang dalam Repelita Kedua?

Dapat diduga bahwa jawaban atas pertanyaan serupa itu akan bermacam-macam, melihat pandangan dan pengetahuan penjawab sendiri. Umpamanya saja, bagi mereka yang memang secara “a priori” mendukung kebijaksanaan yang telah berjalan ini sudah tentu akan mengatakan bahwa berjalan pada kebijaksanaan yang ada merupakan suatu keharusan untuk waktu yang akan datang, jika hendak dijaga kontinuitas pembangunan. Dan sebaliknya bagi mereka yang secara “a priori” pula menentang kebijaksanaan yang ada, atau sekurang-kurangnya para mahasiswa yang ikut berdemonstrasi ke Kemayoran, akan mengatakan bahwa tidak ada baiknya mengulang kembali pita rekaman lama ini dan terdapat suatu kemutlakan untuk menggantikannya dengan yang lain. Dan yang lebih banyak lagi ialah mereka yang kurang dapat memastikan apa isi jawaban yang akan diberikan, mengingat bahwa pengetahuan dan penguasaan atas masalah-masalahnya terlampau sedikit, tak cukup sebagai bahan analisis sebagaimana umumnya

rakyat kita. Kesemua bentuk jawaban itu tercermin juga dalam diskusi terbatas dengan Pronk tersebut.

Tidak ada yang aneh, apalagi salah, dalam keanekaragaman bentuk pandangan yang tercermin dalam jawaban itu. Sebab salah satu jargon kita dalam suasana “Orde Baru” ini ialah meninggalkan penerimaan secara ideologis atas suatu bentuk kebijaksanaan pemerintah. Hal itu adalah konsekuensi dari kampanye agar kita meninggalkan orientasi ideologis — sekalipun kecuali Pancasila — dan mempergunakan pendekatan pragmatis. Orientasi ideologis bersifat kemutlak-mutlakan, sedangkan orientasi pragmatis bersifat kenisbi-nisbian. Artinya, jika kita memakai ukuran-ukuran ideologis dalam menerima atau menanggapi sesuatu, khususnya politik, maka tanggapan dan penerimaan kita itu hanya salah satu dari dua: pasti benar atau pasti salah! Jadi tidak ada apa yang dinamakan “nuansa” atau bentuk pertengahan yang serba-mungkin. Hal itu menjadi pengalaman politik atau bernegara kita di zaman Bung Karno. Setiap ucapan Bung Karno, apalagi yang terjadi pada peristiwa-peristiwa penting seperti hari ulang tahun kemerdekaan, akan diterima dan ditanggapi oleh rakyat — sebagaimana dikehendaki oleh stelsel politik waktu itu — secara mutlak sebagai pegangan dan dalil. Ucapan Bung Karno adalah “*sabdo pandito ratu*”, dan karena itu tak mungkin salah! Tetapi dari sudut pandangan ideologi lain, khususnya yang bertentangan dengan ideologinya Bung Karno, semua ucapan-ucapan itu adalah salah belaka, tidak mengandung kebenaran sedikit pun, dan jika kesempatan ada harus dihancurkan sama sekali dan rakyat harus diusahakan untuk membuang dan melupakannya. Itulah pandangan-pandangan ideologis yang serba kemutlak-mutlakan tadi, baik yang positif (setuju) atau yang negatif (menentang).

Sedangkan pandangan pragmatis yang kenisbi-nisbian atau serba-relatif itu menghasilkan tanggapan yang tetap memberikan kemungkinan yang sama untuk salah dan benar, meskipun tentu saja jika kita tidak ingin kehilangan pegangan, kita harus memilih membenarkan atau menyalahkan dengan melihat mana unsur-

unsurnya sepanjang pandangan kita yang lebih banyak. Bagi seorang yang pragmatis, tidak ada sesuatu yang benar secara mutlak atau salah secara mutlak. Mereka tidak pasang tanda “harga mati” untuk pendirian-pendirian dan pandangan-pandangan mereka sendiri, demikian pula tidak menawar dengan harga mati terhadap pandangan-pandangan atau pendirian-pendirian orang lain.

Karena pragmatisme yang telah kita pilih sendiri, maka memang harus disadari bahwa tidak akan ada jawaban yang terakhir, mutlak atau final terhadap sesuatu masalah, apalagi masalah nasional seperti pembangunan ini. Jawaban yang dapat diberikan ialah apa yang mungkin menurut ukuran keadaan yang ada. Jadi memang ada “coba dan salah” (*trial and error*) dalam politik masa kini. [❖]